

KUDETA JUNTA MILITER MYANMAR TERHADAP AUNG SAN SUU KYI 2021

Willi Ashadi

Universitas Islam Indonesia

153201302@uii.ac.id

Abstract

This paper aims to find out and analyze how the coup carried out by the Myanmar military junta against Aung San Suu Kyi. This research began on November 8, 2022, the Government of Myanmar held a presidential election. The election was won by Aung San Suu Kyi through the National League Democracy (NLD) party. The election was won by Aung San Suu Kyi through the National League Democracy (NLD) party. The opposition through the Union Solidarity and Development did not recognize the election results. They claim that Aung San Suu Kyi's victory in Myanmar's election was carried out by fraud. This made the opposition party reject and the military junta supported the decision. Through the Myanmar military junta, Aung San Suu Kyi was arrested and the election was deemed invalid. The coup by the military junta against Aung San Suu Kyi was carried out so that Myanmar was declared a state of emergency after the military coup led by the military junta in Myanmar. Based on this the author tries to analyze how the military junta carried out a coup against Aung San Suu Kyi.

Keywords: *Kudeta, Junta Militer, Myanmar, Aung San Suu Kyi*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kudeta yang dilakukan oleh Junta militer Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi. Penelitian ini bermula pada 8 November 2022, Pemerintahan Myanmar menyelenggarakan pemilihan Presiden. Pemilu tersebut dimenangi oleh Aung San Suu Kyi melalui partai *National League Democracy* (NLD). Pihak oposisi melalui Union Solidarity and Development tidak mengakui hasil pemilu tersebut. Mereka mengklaim hasil kemenangan Aung San Suu Kyi dalam pemilu Myanmar dilakukan dengan kecurangan. Hal ini membuat partai oposisi menolak dan junta militer mendukung akan putusan tersebut. Melalui Junta militer Myanmar, Aung San Suu Kyi ditangkap dan pemilihan dianggap tidak sah. Kudeta oleh Junta militer terhadap Aung San Suu Kyi dilakukan sehingga membuat Myanmar dinyatakan status darurat pasca kudeta militer Myanmar yang dipimpin oleh Junta militer. Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba menganalisis Bagaimana Junta militer melakukan kudeta terhadap Aung San Suu Kyi.

Kata Kunci: *Kudeta, Junta Militer, Myanmar, Aung San Suu Kyi*

Pendahuluan

Myanmar, yang sebelumnya dikenal sebagai Burma, terletak di Asia Tenggara dan bertetangga dengan Thailand, Laos, Bangladesh, Tiongkok, India. Myanmar memiliki sekitar 54 juta penduduk. Myanmar terdiri dari banyak kelompok populasi etnolinguistik yang berbeda tetapi orang Burma adalah populasi mayoritas. Kota terbesar adalah Yangon (Rangoon) dan sejak 2012 ibu kota telah dipindahkan ke Nay Pyi Taw. Agama mayoritas penduduk Myanmar adalah Buddha. Ada banyak kelompok etnis di negara ini, termasuk Muslim Rohingya. Bangsa ini memperoleh kebebasan dari Inggris pada tahun 1948. Pemerintah sipil memerintah negara tersebut setidaknya hingga tahun 1962. Militer Myanmar menggulingkan pemerintah sipil dan memerintah negara itu dari tahun 1962 hingga 2011. Militer saat ini kembali bertanggung jawab dan telah menyatakan keadaan darurat selama setahun. Militer kembali

mengambil alih kendali pada 1 Februari 2021 setelah pemilihan umum yang dimenangkan oleh partai NLD dengan telak.

Angkatan Bersenjata mendukung pembatasan majelis pemungutan suara yang mengklaim pemerasan umum. Panitia konstituen tidak memiliki bukti untuk mendukung pernyataan ini. Cupidata tiba sejak ia mengambil bagian dalam sesi Kongres modern. Suu Kyi mengambil tempat yang tidak jelas setelah penggulingan. Ia menghadapi berbagai afirmasi seperti distribusi data yang akan memiliki pesan yang dapat memicu keributan dan dapat menyebabkan ketakutan atau peringatan pelanggaran badan resmi. *The National League for Democracy* NLD merupakan kumpulan yang tidak digunakan untuk menutupi kumpulan modern. Pelopor mereka mendorong para pembangkang untuk menjaga diri demi responden. saat ini pemimpin militer Min Aung Hlaing telah berkuasa, ia memiliki pengaruh politik yang cukup besar, ia juga telah berhasil mempertahankan kekuatan Tatmadaw (militer Myanmar), bahkan ketika negara tersebut pindah ke demokrasi. Namun ia mendapat hukuman di seluruh dunia dan sanksi atas tuduhan serangan militer terhadap minoritas.

Sudah berbulan-bulan sejak kudeta militer di Myanmar, dan orang-orang masih berunjuk rasa di jalanan. Junta militer telah memberlakukan banyak larangan untuk mencegah arus komunikasi, termasuk mengganggu akses internet dan saluran telepon. Tidak ada perdebatan tentang sejarah panjang penindasan Myanmar protes damai, pelanggaran hak-hak dasar, dan penangkapan sewenang-wenang. Baru-baru ini bergerak, komisi pemilihan negara bagian telah menunjukkan niatnya untuk membubarkan partai politik pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi, *The National League for Democracy* (NLD), karena dugaan keterlibatannya dalam pemilihan umum 2020, dengan alasan kecurangan pemilihan, dan dapat menuntut para pemimpinnya dengan pengkhianatan. Pada 24 Mei 2021, Aung San Suu Kyi muncul di hadapan pengadilan untuk pertama kalinya setelah penahanannya di kup. Dia tampak bertekad untuk mendukung para pendukung demokrasi dan mengaku bahwa partainya ada selama orang-orang ada (Saxena, 2021).

Myanmar telah menyaksikan pemerintahan militer yang kejam sejak kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1948. Pada 1 Februari 2021, militer Myanmar menahan banyak pemimpin politik, aktivis, dan pemimpin senior NLD di Naypyidaw dan lainnya bagian negara. Pemimpin populer Aung San Suu Kyi ditahan di rumahnya. Diasumsikan bahwa kudeta terjadi karena kekalahan kandidat yang didukung militer dan kemenangan telak NLD dalam pemilihan umum, yang diadakan pada November 2020. NLD memenangkan 346 kursi di parlemen, lebih banyak lagi dari 322 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan baru. Hasil pemilu yang menguntungkan Aung San Suu Kyi, ikon demokrasi, mengejutkan rezim militer (Saxena, 2021).

Tentara berusaha untuk membalikkan pemilihan, menuduh proses yang tidak adil dan bias. Aung San Suu Kyi tetap ditahan oleh militer, yang telah mengajukan beberapa tuduhan terhadapnya. Tentang krisis konstitusional Myanmar ini, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan bahwa pergantian pemilu “tidak dapat diterima” dan mendesak masyarakat internasional “untuk memastikan” pengambilalihan dan kudeta militer gagal. Ironisnya, Myanmar memiliki pengalaman singkat tentang sistem quasi demokrasi setelah 2011 ketika militer yang kuat, bernama “Tatmadaw,” memulai pemilihan parlemen. Meskipun militer memesan 25 persen dari semua kursi di parlemen untuk dirinya sendiri dan menempatkan perlindungan lain dalam konstitusi untuk dirinya sendiri keuntungan dalam pemilihan umum 2015, NLD Aung San Suu Kyi menang besar di keduanya rumah. Sangat diharapkan bahwa kemenangan NLD akan memulai babak baru dalam proses transisi demokrasi Myanmar dan akan membatasi kekuasaan militer. Sebaliknya, Tatmadaw tetap berkuasa, dengan kendali atas legislatif dan kekuasaan untuk memilih presiden; Aung San Suu Kyi dilarang dari memegang kekuasaan eksekutif apa pun di bawah konstitusi. Dia memegang posisi "penasihat negara bagian" dan merupakan pemimpin de facto. Dia secara pribadi menyaksikan militer kekejaman terhadap etnis minoritas, namun dia juga menolak kritik internasional “pembersihan etnis” Rohingya dan bahkan membela yang dipengaruhi militer pemerintah terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Mahkamah Internasional Keadilan

pada 10 Desember 2019. Dukungan Aung San Suu Kyi terhadap pemerintah Myanmar yang dianggap bertanggung jawab atas “niat genosida” terhadap etnis minoritas Rohingya oleh Misi Pencari Fakta Internasional PBB Report, memfitnah citranya sebagai ikon demokrasi, yang mengakibatkan hilangnya kredibilitas internasional (Saxena, 2021).

Fase terburuk terjadi setelah kudeta militer Februari 2021 di mana militer mengambil alih negara dan para pemimpin militer (bekerja sebagai Dewan Administrasi Negara) melancarkan tindakan brutal terhadap pro-demokrasi demonstran. Pemberitaan tersebut menyatakan bahwa kudeta militer telah membunuh harapan demokrasi di Myanmar dan menumbuhkan kekhawatiran atas perang saudara di Myanmar. Ia berpendapat bahwa ini merupakan lonceng alarm atas munculnya otokrasi di kawasan dan potensi dampak bencana terhadap keamanan dan stabilitas kawasan (Saxena, 2021).

Tirani militer memiliki sejarah panjang di Myanmar, mulai dari ketika itu dikenal sebagai Burma. Pembunuhan Jenderal Aung San pada tahun 1947, pahlawan nasional kemerdekaan Burma dan pendiri Nasional Burma Angkatan Darat, memulai Burma di jalan menjadi negara yang didominasi militer. Namun, itu tetap merupakan jenis demokrasi parlementer dengan pengaruh militer yang besar, sampai kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win pada tahun 1962. Ne Win memberlakukan rezim otoriter yang keras, termasuk penangguhan konstitusi 1947, penindasan demonstrasi, penangkapan lawan politik, dan tindakan keras tentang “kelompok etnis bersenjata.” (Saxena, 2021)

Kebencian terhadap rezim Ne Win meledak menjadi protes massal pada tahun 1988, didominasi oleh mahasiswa yang menuntut sistem multipartai, sehingga penggantian rezim militer lama dengan yang baru dan pembentukan Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara (SLORC). Rezim militer baru didirikan dengan mengorbankan demokrasi, yang menyebabkan kematian ratusan ribuan pengunjuk rasa (Saxena, 2021). Pada saat yang sama, suara pro-demokrasi semakin kuat, dan SLORC mengalah dan mengizinkan pendaftaran partai politik. Itu selama jurusan ini perkembangan bahwa Aung

San Suu Kyi, putri Mayor Jenderal Aung San, mendirikan NLD dan mengangkat suaranya menentang penyalahgunaan kekuasaan oleh militer dan memimpin tekanan pada rezim militer untuk mengadakan pemilihan. Pertunjukan kekuatan ini mengancam junta militer, yang menempatkannya di bawah tahanan rumah (Saxena, 2021).

Di bawah tekanan domestik dan internasional, rezim militer mengadakan pemilihan pada tahun 1990. NLD memenangkan pemilihan, tetapi junta menolak untuk menerima pemilihan tersebut. Hasil pemilu, mempertahankan kontrol ketat atas pemerintah, menangkap orang-orang terpilih pemimpin dan aktivis, dan menahan Aung San Suu Kyi di bawah tahanan rumah, suatu kondisi isolasi di mana dia tinggal sebentar-sebentar selama dua dekade (Saxena, 2021).

Pada tahun 2008, rezim militer mengadopsi konstitusi baru dalam referendum kontroversial, memastikan kontrolnya atas pemerintah dengan memesan 25 persen dari kursi parlemen untuk pejabat militer. Konstitusi baru juga didiskualifikasi pasangan dan orang tua warga negara asing dari menjabat sebagai presiden Myanmar, yang mengecualikan Aung San Suu Kyi. Para jenderal menyebut perubahan konstitusional ini sebagai “demokrasi berdisiplin.”¹¹ Meskipun demikian, Aung San Suu Kyi berusaha popularitas di tingkat nasional dan internasional, dan partainya terus menang pemilu 2015 dan 2020 (Saxena, 2021).

Relevansi Teori Kudeta

Menjelang sidang perdana parlemen hasil pemilihan umum pada November 2020, militer Myanmar yang dipimpin oleh Jenderal Aung Hlaing mengambil alih pemerintahan Myanmar. Militer Myanmar melakukan penangkapan terhadap Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Mynt, serta beberapa tokoh dari Partai Liga. Hal ini mengakibatkan Myanmar yang belum lama memulai masa transisi menuju sistem pemerintahan demokrasi, kembali dikuasai oleh militer pada 1 Februari 2021

Kudeta Junta Militer Myanmar...(Willi Ashadi)
(Roza, 2021). Kudeta ini memancing sejumlah masyarakat turun ke jalan di

seluruh kawasan yang ada di Myanmar dengan tujuan untuk melakukan protes terhadap kudeta yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Myanmar (Aida, 2021). Melansir dari BBC, pihak angkatan bersenjata yang berpihak pada oposisi, menuntut adanya pemungutan suara ulang dan mengklaim kemenangan yang ada adalah sebuah penipuan (Aida, 2021).

Lalu apakah sejatinya makna dari kudeta itu sendiri? Kudeta adalah salah satu dari upaya merebut kekuasaan, terlebih dalam lingkup suatu pemerintahan. Kudeta seringkali dilakukan secara ilegal demi mendapat kekuasaan. Jika melihat kita lihat kembali dalam sejarah kudeta, kejadian seperti ini sudah biasa terjadi di berbagai negara Amerika Latin pada abad ke-19 dan abad ke-20 serta di Afrika setelah negara-negara yang ada di sana memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1960-an (Sendari, 2021).

Kemudian, menurut ilmuwan politik yang ada di Universitas Kentucky Clayton Thyne, menjelaskan definisi kudeta sebagai sebuah upaya ilegal dan terbuka oleh militer atau elit lain yang ada dalam aparaturnegara dengan tujuan menggulingkan eksekutif yang sedang menjabat. Melansir dari *Thoughtco*, pemimpin dari kudeta militer seringkali disebut sebagai calon diktator yang tidak mau mengakui pemerintahan yang sedang berkuasa, hal ini dikarenakan ia ingin merebut kekuasaan dan mendirikan pemerintahan sesuai dengan versinya sendiri (Sisca, 2021).

Kudeta militer biasanya mendapat dukungan dari semua angkatan bersenjata dalam suatu negara. Dengan begitu, kudeta militer sering dikaitkan dengan terjadinya aksi kekerasan oleh aparat keamanan negara terhadap warga sipil, seperti kudeta yang terjadi di Myanmar pada tanggal 1 Februari 2021 yang masih berlangsung hingga saat ini. Kudeta militer berbeda dengan revolusi, kudeta militer hanya bertujuan untuk menggantikan personel utama dari pemerintah dan tidak memaksa perubahan besar-besaran pada ideologi sosial dan politik dari negara tersebut (Aida, 2021).

Menurut pendapat ilmuwan politik Samuel P Huntington dalam bukunya yang berjudul "*Political Order in Changing Societies*" pada tahun

1968, ia menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis kudeta yang diakui secara umum, yaitu (Aida, 2021):

1. Kudeta Terobosan

Pada jenis pengambilalihan yang paling umum, kelompok oposisi dari penyelenggara sipil atau militer menggulingkan pemerintah yang sedang berkuasa dan menempatkan diri mereka sebagai pemimpin negara baru.

2. Kudeta Wali

Kudeta wali adalah bentuk penggulingan pemerintahan yang berkuasa dan biasanya dibenarkan demi kebaikan bangsa yang lebih luas. Pemimpin kudeta akan mengumumkan diri sebagai orang yang akan meningkatkan ketertiban umum, efisiensi, serta mengakhiri korupsi di negara yang bersangkutan. Kudeta wali terjadi saat kelompok elit merebut kekuasaan kelompok elit lainnya.

3. Kudeta Veto

Kudeta veto dilakukan melalui partisipasi serta mobilisasi sosial dari sekelompok warga sipil untuk melakukan penekanan dalam jumlah besar yang berbasis luas pada oposisi sosial. Biasanya, agar mencegah perubahan politik yang radikal, maka militer perlu untuk turun tangan.

Sementara itu Edwark Luttwak menyebutkan bahwa suatu kudeta dapat berhasil jika menerapkan 3 hal antara lain, melakukan strategi kudeta, merencanakan kudeta dan terakhir adalah pelaksanaan kudeta. Tiga pendekatan tersebut relevan untuk mengetahui penelitian ini bagaimana cara junta militer Myanmar melakukan kudeta terhadap Aung San Suu Kyi tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu menggunakan studi pustaka sesuai dengan topik yang diteliti. Studi pustaka yang digunakan akan berkaitan dengan topik yang akan ditinjau yakni bagaimana Bagaimana Junta militer melakukan kudeta terhadap Aung san suu kyii. Penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang luas yang meliputi berbagai metode penelitian. Penelitian kualitatif membutuhkan pengumpulan informasi yang sistematis, informasi yang tekstual seperti gambar, wawancara, video, dan juga biasanya penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data dan analisis (Young & Hren, 2017). Adapun tahap awal dalam mengolah data, penulis harus memastikan referensi yang didapatkan telah dibaca secara keseluruhan dan menuliskan poin-poin penting yang dibutuhkan.

Pembahasan

Dinamika dan Hubungan Junta Militer Myanmar Terhadap Aung Suu Kyi

Hubungan kurang harmonis antara militer dan Aung San Suu Kyi sudah sejak lama. Dimana Aung San Suu Kyi pernah mengkritik rezim militer di Myanmar. Aung merangkul masyarakat sipil untuk melakukan demonstrasi secara damai, namun militer melarang dan melakukan tindakan militer sehingga banyak korban yang tewas dan Aung menjadi tahanan rumah. Peristiwa tersebut membuat warga Myanmar menaruh harapan terlebih lagi Aung meraih nobel perdamaian pada tahun 1991 dari PBB.

1. Junta Militer Myanmar

Pada tanggal 21 Februari masyarakat Myanmar telah dikejutkan dengan serangkaian aktifitas kudeta yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar. Junta Militer Myanmar juga sering disebut dengan Tatmadaw oleh rakyat lokal. Dibalik kudeta tersebut ada beberapa tokoh penting yang

semakin mempercepat mendorong terjadinya penggulingan kekuasaan rezim pemerintah saat itu. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah Kepala Angkatan Bersenjata Jendral Min Aung Hlaing, Wakil Presiden Myint Swe, Menteri Dalam Negeri Letnan Jendral Soe Htut, dan Jendral Mya Tu Oo selaku Menteri Pertahanan.

Kudeta yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar diinisiasi oleh Jendral Min Aung Hlaing selaku Kepala Angkatan Bersenjata. Sejak saat kudeta dilakukan dia telah ditetapkan menjadi Presiden dan memimpin Myanmar untuk periode satu tahun kedepan. Diketahui bahwa sebelumnya Min Aung Hlaing menjadi individu yang cukup lama dipandang terkemuka dalam angkatan bersenjata. Tahun 1970 dia memutuskan untuk bergabung dalam dinas militer dan kapabilitasnya terus mengalami peningkatan. Peningkatan itu juga berpengaruh pada pesatnya pangkat yang diperoleh Min Aung Hlaing hingga dia mampu menjabat sebagai panglima tertinggi di tahun 2011. Selain sebelum memasuki dinas militer, diketahui telah belajar ilmu hukum.

Min Aung Hlaing melanjutkan karirnya di pemerintahan semi-sipil pertama Myanmar dan ditargetkan akan menjadi presiden periode selanjutnya. Namun perkiraan tersebut salah, karena hasil pemilu tahun 2015 dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Kemenangan itu menandakan bahwa Myanmar akan jatuh dibawah kekuasaan oposisi Min Aung Hlaing, yakni Aung San Suu Kyi. Terbukti, Aung San Suu Kyi menjadi kepala negara secara de facto.

Kemenangan Aung San Suu Kyi tak lantas membuat diam Jendral Min Aung Hlaing. Justru hal tersebut membuatnya semakin vokal di ranah public melalui media sosialnya. Berdasarkan data oleh Radio Free Asia, Min Aung Hlaing mulai meningkatkan pengikutnya. Namun usahanya harus mendapat hambatan karena akun media sosial nya dihapus secara resmi oleh Facebook dan Twitter. Penghapusan akun Min Aung Hlaing dipicu oleh insiden penganiayaan tentara terhadap Muslim Rohingya. Secara dramatis, pada tahun 2017 kurang lebih sebanyak 750.000 etnis Rohingya harus melarikan

diri ke negara ketiga, Bangladesh karena adanya dugaan “genosida”. Dugaan tersebut juga sejalan dengan penyelidikan PBB yang menyatakan bahwa operasi yang dilakukan oleh Militer Myanmar masuk ke dalam kategori genosida, karena telah melakukan pemerkosaan, pembunuhan massal dan lain-lain.

Min Aung Hlaing dikenal tidak sejalan dengan pemerintahan sipil dan tidak suka dengan peningkatan popularitas oposisinya, Aung San Suu Kyi. Ketidaksukaannya pada Aung San Suu Kyi semakin meningkat kala kekalahan Partai Union Solidarity and Development (USDP), partai yang didukung oleh militer, pada November tahun lalu. Sebelum pemilu berlangsung, diketahui bahwa Min Aung Hlaing telah bekerja sama dengan USDP untuk membantunya di pemilihan presiden. Namun yang didapatkan oleh Min Aung Hlaing hanyalah kekalahan telak dari Aung San Suu Kyi. Dia dan para jenderal lainnya menganggap bahwa kemenangan yang didapatkan oleh Aung San Suu Kyi adalah kecurangan dan memaksa perhitungan ulang. Diketahui bahwa Min Aung Hlaing akan pensiun pada bulan Juli mendatang. Masyarakat bulai berspekulasi dan mengaitkan insiden kudeta dan usia pensiunnya. Mereka menganggap bahwa Min Aung Hlaing ingin tetap memiliki jabatan dan eksis di dunia perpolitikan.

Tokoh lain yang tak kalah penting adalah Wakil Presiden Myint Swe. Berkat Myint Swe, Jendral Min Aung Hlaing dapat menjadi presiden Myanmar. Saat kudeta berlangsung, tentara menghendaki Myint Swe sebagai pengganti presiden. Namun ketika dia telah menjadi presiden, segera kekuasaannya diserahkan kepada Jendral Min Aung Hlaing yang pada saat itu menjadi komandan militer tertinggi Myanmar. Berdasarkan konstitusi Myanmar 2008 menyatakan bahwa dalam keadaan darurat presiden memiliki wewenang untuk menyerahkan kekuasaannya kepada komandan militer.

Telah menjadi rahasia umum bahwa Militer Myanmar menjadi lembaga yang terkuat, bahkan sejak awal mula Burma terbentuk pada tahun 1948. Kemerdekaan Myanmar tak bisa lepas dari peran penting Jenderal Aung San. Dia merupakan ayah dari Aung San Suu Kyi, Penasihat Negara

yang kini sedang ditahan oleh Militer Myanmar. Kala itu, dengan bantuan Jepang Jenderal Aung San membentuk Tentara Nasional Burma pada tahun 1940-an. Namun di tahun 1947, Jenderal Aung San dibunuh. Sementara Militer Myanmar atau biasa disebut dengan Tatmadaw tetap mengantongi dukungan masyarakat sebagai lembaga yang memerdekakan Myanmar dari jeratan pemerintah kolonial.

Periode kuasi-demokrasi yang singkat kemudian harus diambil alih oleh Jenderal Ne Win melalui kudeta yang dilakukannya pada tahun 1962. Pasca kudeta, militer lantas melarang adanya partai oposisi dan melakukan nasionalisasi bisnis dan industri yang ada di Myanmar. Kejadian ini juga menandai adanya “Jalan Burma menuju Sosialisme”, merupakan bentuk ideologi yang nantinya berdampak pada hancurnya perekonomian dan terisolasi dari komunitas internasional.

Tahun 1988 terjadi serangkaian demo dan protes secara nasional yang diinisiasi oleh aktivis mahasiswa. Mereka melakukan protes karena perekonomian Myanmar kian merosot dan menekan adanya reformasi demokrasi. Demo direspons oleh militer dengan tindakan kekerasan yang menyebabkan 5.000 orang tewas. Alhasil tindakan militer dapat meredam demo, namun tak menyurutkan keinginan pengunjuk rasa untuk melakukan reformasi sistem pemerintahan Myanmar menjadi sistem demokrasi. Protes juga menandai penurunan dukungan secara dramatis terhadap kepemimpinan Militer saat itu. Sementara disisi lain, Aung San Suu Kyi segera membentuk NLD dan turut menekan pemerintah militer untuk melaksanakan pemilu.

Adanya tekanan domestik dan internasional secara terus menerus membuat militer akhirnya menyerah dan melakukan pemilihan. Hasilnya NLD memenangkan pemilihan secara telak. Namun kemenangan NLD tidak diterima oleh Tatmadaw dan melakukan penangkapan Aung San Suu Kyi di tahanan rumah. Militer berjanji akan melakukan pemilihan baru setelah membentuk dan merancang sebuah konstitusi baru. Namun selama 18 tahun janji tersebut tidak terpenuhi.

Berdasarkan sumber, Tatmadaw secara sukarela mulai merancang konstitusi baru setelah memimpin negara selama dua dekade. Penyusunan konstitusi baru tersebut dilakukan pada tahun 2008. Setelah itu, militer melakukan referendum konstitusional yang terbilang kontroversial karena tidak melibatkan kelompok oposisi. Dalam konstitusi baru itu diatur bahwa sebanyak 25 persen dari kursi parlemen baik nasional dan lokal akan disisihkan untuk militer. Hal itu bertujuan untuk melayani para pejabat militer. Konstitusi ini juga memberikan wewenang yang kuat terhadap Tatmadaw, mereka dapat memveto atas reformasi konstitusional yang diusulkan oleh legislator sipil. Konstitusi baru itu masih berlaku hingga saat ini. Di bawah pengaturan tersebut, militer berhak untuk mengontrol industri minyak, pertambangan dan gas negara. Implikasinya adalah Tatmadaw mendapat pendanaan secara mandiri yang memudahkan mereka untuk tidak peduli terhadap seruan domestic maupun internasional.

2. Aung San Suu Kyi

Daw Aung San Suu Kyi atau biasa dikenal dengan nama Aung San Suu Kyi lahir pada 19 Juni 1945, Rangoon, Burma (sekarang disebut Yangon, Myanmar). Aung San Suu Kyi adalah anak dari pasangan Aung San dan Khin Kyi. Aung san merupakan salah satu pahlawan kemerdekaan nasional yang meninggal karena terbunuh. Khin Kyi selaku ibu dari Aung San Suu Kyi adalah seorang diplomat Burma Aung San Suu Kyi memenangkan hadiah Nobel tentang Perdamaian di tahun 1991. Aung San Suu Kyi juga dikenal sebagai politisi sekaligus pemimpin oposisi Myanmar. Dia mulai masuk ke pemerintahan di tahun 2016, termasuk menjadi penasihat negara. Jabatan penasihat negara secara de facto membuat Aung San Suu Kyi menjadi pemimpin negara. Namun dia tidak bisa menyelesaikan jabatan tersebut karena pada Februari 2021 militer secara paksa merebut kekuasaannya. Peristiwa ini sering disebut dengan kudeta.

Ketika terbunuh, ayahnya sedang bekerja sebagai perdana Menteri de facto dan saat itu Aung San Suu Kyi masih berusia dua tahun. Sebelum tahun 1960, Aung San Suu Kyi bersekolah di Burma, sampai akhirnya ibunya diangkat sebagai duta besar untuk India. Karena itulah dia sempat pindah ke India. Setelah itu, Aung San Suu Kyi melanjutkan studi kuliahnya di Universitas Oxford. Disitulah ia akhirnya bertemu dengan suaminya, yaitu Michael Aris. pernikahannya dengan Aris membuahkan dua anak. Namun tahun 1988 Aung San Suu Kyi harus meninggalkan anak dan suaminya dan kembali ke Burma karena ibunya yang telah sakit keras. Saat itu ia menyaksikan pembantaian masal yang dilakukan oleh militer, dibawah kepemimpinan U Ne Win. Pembantaian masal itu terjadi karena banyak protes yang pecah dari masyarakat Myanmar atas ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan U Ne Win yang brutal dan tidak responsif. Dari situlah dia mulai berbicara dan menentang rezim pemerintahan. Selain itu Aung San Suu Kyi mulai memperjuangkan perubahan sistem pemerintahan Myanmar ke demokrasi dan juga mulai memperhatikan hak asasi manusia warga negara Myanmar.

Juli 1989, Suu Kyi harus mendekam di dalam rumah tahanan yang bertempat di Yangon. Penahanan Suu Kyi dilakukan oleh pemerintah militer. Bahkan Suu Kyi ditahan dengan tanpa komunikasi. Militer memberikan pilihan kepada Suu Kyi mengenai kebebasannya. Mereka akan membebaskan Suu Kyi apabila dia bersedia untuk meninggalkan Myanmar. Namun dengan tegas Suu Kyi menolak tawaran itu sampai negara Myanmar bebas dari cengkraman militer dan dipegang oleh pemerintahan sipil, serta tahanan politik harus dibebaskan. Satu tahun sebelum penahanannya, Suu Kyi mendirikan partai yang bernama Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dimana pada tahun 1988 memiliki lebih dari 80 persen kursi parlemen. Artinya dia dan NLD mengalahkan oposisi secara telak. Namun pemerintah militer enggan mengakui kemenangan NLD dan di tahun 2010 secara resmi militer membatalkan hasil pemilu tahun 1990. Ketika mendapatkan Nobel Perdamaian dia masih berada dalam rumah tahanan, sehingga Alexander Aris sebagai putranya menggantikan Suu Kyi.

Pada Juli 1995, akhirnya Suu Kyi dibebaskan. Namun pergerakannya masih dibatasi. Terbukti Suu Kyi tidak diperbolehkan untuk berpergian keluar Yangon. Tahun berikutnya, dia mulai aktif dengan partai NLD, namun militer masih terus mengawasi pergerakan Suu Kyi. Suu Kyi membentuk komite perwakilan yang ia sebut sebagai parlemen penguasa yang legal di Myanmar. Pembentukan parlemen itu dia lakukan pada tahun 1998. Tahun berikutnya, suaminya, Michael Aris meninggal dunia di London. Sebelumnya Aris sempat mengajukan visa untuk dapat ke Myanmar mengunjungi Suu Kyi, namun pengajuan itu harus terhambat karena junta militer melakukan penolakan.

Tak hanya sekali, pada September 2000 sampai Mei 2002 Tatmadaw kembali menahan Suu Kyi di rumah tahanan. Tahun 2003 pun Suu Kyi kembali ditahan oleh militer karena dampak dari bentrokan NLD dan demonstran yang pro-pemerintah. Disisi lain, masyarakat Myanmar hingga komunitas internasional juga terus menekan militer untuk membebaskan Suu Kyi. Hingga pada tahun 2009, PBB menyatakan bahwa penahanan atas Suu Kyi yang dilakukan oleh militer adalah ilegal. Hal itu dilihat dari hukum yang berlaku di Myanmar sendiri. Berdasarkan sumber yang beredar, ada sedikit pelanggaran penjagaan di rumah tahanan, itu memungkinkan Suu Kyi dapat menerima koran, majalah serta surat dari anaknya.

Diketahui bahwa Mei 2009, sebelum periode berakhirnya penahanan di rumah tahanan, Suu Kyi kembali di klaim oleh militer telah melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh rumah tahanan. Berdasarkan data, ada seorang penyusup, warga AS yang mengunjungi rumahnya selama dua malam. Hasilnya, bulan Agustus Suu Kyi kembali dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman selama tiga tahun penjara. Ketika Suu Kyi dihukum, masyarakat Myanmar beserta komunitas internasional percaya bahwa keputusan yang terbaru ini memang diatur untuk menghambat Suu Kyi turut berpartisipasi di pemilihan parlemen multipartai yang akan digelar pada tahun 2010.

Kecurigaan yang muncul kemudian lambat laun mulai dibuktikan dengan adanya serangkaian undang-undang pemilu yang berlaku pada maret 2010. Pertama, Melarang setiap individu yang memiliki Riwayat kejahatan untuk turut berpartisipasi dalam pemilihan. Peraturan ini merujuk pada apa yang telah Suu Kyi lakukan pada tahun 2009. Kedua, siapa pun yang telah menikah dengan warga negara asing maka akan didiskualifikasi dari pemilu. NLD selaku partai yang dibentuk oleh Suu Kyi pun melakukan penolakan untuk mendaftar ulang di bawah peraturan terbaru itu. Semua itu dilakukan NLD untuk mendukung Suu Kyi. Pada pemilihan 7 November 2010 partai pemerintah hanya menghadapi sedikit oposisi sehingga dapat memenangkan pemilihan dengan mudah. Ditengah tuduhan penipuan pemilu, mereka mendapatkan banyak kursi legislatif. Kemudian setelah enam hari pemilihan, Suu Kyi akhirnya dibebaskan dan berjanji untuk meneruskan melawan kekuasaan militer.

Pada tahun 2011, pembatasan yang diberlakukan pada Suu Kyi kian melonggar. Suu Kyi mulai diizinkan untuk bertemu dengan pejabat dan orang lain. Bahkan di pertengahan tahun, Suu Kyi telah diizinkan untuk perjalanan ke luar kota Yangon. Selain itu, peraturan politik turut dilonggarkan dan pada April 2012, tepat sebelum pemilihan parlemen, NLD kembali aktif berpolitik. Pada tahun yang sama di bulan Februari, pencalonan diri yang diajukan oleh Suu Kyi telah mendapat persetujuan dari pemerintah. Kemenangan didapatkan dengan mudah oleh Suu Kyi, dan akhirnya pada 2 mei 2012 dia dilantik. Suu Kyi mulai meningkatkan profilnya di ranah internasional, termasuk kunjungannya ke China di pertengahan 2015. Peningkatan profil itu dilakukan dengan tujuan untuk mendorong liberalisasi politik yang lebih luas di Myanmar. Namun kemajuan yang dilakukan oleh Suu Kyi tidak terlalu berpengaruh pada perubahan konstitusional yang melarang seorang calon untuk maju ke pemilihan ketika pasangan atau anaknya termasuk warga negara asing.

Pemilihan yang diselenggarakan awal November 2015 berhasil dimenangkan oleh NLD. Kemengan itu dapat mengamankan Sebagian besar

pemerintahan nasional periode berikutnya. Namun Suu Kyi tetap tidak bisa karena konstitusional baru masih tetap berlaku. Maka dari itu NLD memilih orang yang terpercaya agar dapat maju menjadi presiden. NLD memilih Htin Kyaw sebagai kandidat presiden Myanmar. Kemudian Htin Kyaw resmi dilantik menjadi presiden pada 30 Maret.

Awal pemerintahan baru, Suu Kyi merangkap empat jabatan pemerintahan, diantaranya adalah Menteri Pendidikan, Menteri Energi, Menteri di kantor presiden dan Menteri Luar Negeri. Tetapi hanya hitungan seminggu Suu Kyi melepaskan dua jabatan dan diangkat menjadi penasihat negara. Jabatan sebagai penasihat negara ini hampir sama dengan perdana Menteri dan berkemungkinan lebih berkuasa dari pada presiden. Tentu jabatan penasihat negara yang diberikan kepada Suu Kyi direspons dengan kemarahan oleh militer. Anggota militer yang ada di kursi parlemen dengan tegas mencela RUU yang mengatur jabatan Penasihat Negara itu dengan klaim tidak konstitusional dan melakukan penolakan untuk turut ambil bagian dari pemungutan suara pada RUU baru tersebut.

Fokus dari jabatan penasihat negara adalah untuk mencari jalan perdamaian daintara banyak organisasi bersenjata etnis di Myanmar. Berdasarkan data, sebanyak 20 organisasi bersenjata etnis di negara Myanmar masih aktif melakukan pemberontakan. Satu sisi Suu Kyi cukup berhasil dalam memainkan peranannya sebagai penasihat negara. Namun disisi lain dia dan pemerintahan Myanmar banyak mendapat kecaman dari komunitas internasional karena perlakuan Suu Kyi terhadap etnis muslim Rohingya di negara bagian Rakhine Myanmar. Bahkan diduga pemerintah Myanmar melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan membuat Sebagian besar etnis muslim Rohingya melarikan diri ke negara ketiga. Hal ini tidak sejalan dengan sejarah Suu Kyi yang disebut sebagai pejuang demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itulah dia mendapatkan kritikan keras. Ketika militer melakukan tindakan kekerasan pada etnis muslim Rohingya, Suu Kyi seolah tidak melihat dan mengabaikannya begitu saja. Beberapa organisasi mulai mencabut penghargaan tentang hak asasi manusia yang sebelumnya

diberikan kepada Suu Kyi. Pencabutan penghargaan itu dilakukan sebagai bentuk protes atas lambatnya Suu Kyi untuk menangani krisis Rohingya.

3. Kebijakan Junta Terhadap Aung San Suu Kyi

Pasca kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi, masyarakat menjadi terbelah menjadi 2 kelompok yaitu kelompok militer serta yang mendukung Min Aung Hlaing dan pro demokrasi yang mendukung Aung San Suu Kyi. Meskipun demikian, tetap yang berkuasa dan mengambil alih kuasa pemerintah Myanmar adalah militer. Siapapun yang memprotes kebijakan militer ataupun melawan militer akan ditindak tegas oleh militer. Tidak sedikit dari masyarakat sipil yang pro Aung San Suu Kyi ditangkap bahkan tewas ditangan militer.

Ada beberapa factor dan alasan mengapa Junta militer melakukan kudeta dan penangkapan Aung San Suu Kyi serta mengambil alih kekuasaan di Myanmar, antara lain berawal dari kekalahan partai yang didukung oleh militer yaitu *Union Solidarity and Development Party* mengalami kekalahan dalam pemilihan umum di Myanmar pada November tahun 2020. Dimana pada pemilihan umum waktu itu dimenangi oleh partainya Aung San Suu Kyi yaitu *National League for Democracy (NLD)*. Namun pihak oposisi yang didukung oleh militer tidak menerima dan menyatakan hasil tersebut direayasa, ada kecurangan dan tidak dapat dipertanggungjawaban. Partai oposisi menghendaki pemilihan ulang karena pemilihan tidak jujur dan banyak memanipulasi data meskipun dibantah oleh komisi pemilihan umum Myanmar. Termasuk juga yang menjadi sorotan dalam pemilu adalah tidak diberikannya hak bagi etnis Rohingya dalam berpartisipasi pemilihan umum di Myanmar.

Selain itu factor adanya tudingan oleh junta militer terhadap Aung San Suu Kyi melakukan tindak pidana korupsi. Dimana Aung San Suu Kyi diduga melakukan korupsi berupa menerima suap sebesar US 600.000 dan emas illegal. Presiden Myanmar Wyn Mynt beserta beberapa menteri juga

Kudeta Junta Militer Myanmar...(Willi Ashadi)
dituding melakukan korupsi. Hal ini juga yang membuat junta militer

melakukan kudeta terhadap Aung San Suu Kyi dan mengambil alih kekuasaan di Myanmar meskipun organisasi HAM amnesty mengkritik serta menyebutkan bahwa junta militer tidak dapat membuktikan tudingannya tersebut.

Selain itu yang menjadi factor mengapa junta militer melakukan kudeta terhadap Aung San Suu Kyi karena pelanggaran hak asasi manusia, dimana Aung San Suu Kyi memarjinalkan dan dianggap melakukan pelanggaran terhadap minoritas etnis Rohingya. Sekalipun tindakan tersebut dilakukan oleh militer namun atas penguasaan Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi telah melakukan genosida terhadap etnis Rohingya sehingga memperburuk citra Myanmar sekaligus reputasinya yang pernah meraih nobel perdamaian dunia. Bahkan mahkamah internasional melakukan investigasi dan akan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar dibawah kekuasaan Aung San Suu Kyi.

Aung San Suu Kyi melakukan impor walkie-talkie secara illegal tanpa lisensi, hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa junta militer melakukan kudeta terhadap Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi juga memiliki peralatan selundupan dirumahnya ketika dilakukan pengeledahan oleh junta militer Myanmar. Dengan rentetan kasus walkie-talkie tersebut Aung San Suu Kyi dituntut hukuman 4 tahun oleh junta militer Myanmar.

Aung San Suu Kyi juga melakukan pelanggaran aturan covid 19 tatkala melakukan kampanye dalam rangka pemilihan umum di Myanmar. Hal ini menambah alasan dilakukan kudeta militer terhadap Aung San Suu Kyi terlebih lagi junta militer mendapat dukungan dari komunitas internasional.

Termasuk adanya hasutan dan ajakan kewarga sipil Myanmar yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi untuk menentang junta militer Myanmar dianggap sebagai salah satu alasan mengapa junta militer melakukan pengambil alihan kekuasaan di Myanmar. Dengan alasan tersebut yang sudah dijelaskan merupakan factor dan alasan mengapa terjadi kudeta militer terhadap Aung San Suu Kyi di Myanmar tahun 2021.

Analisis Kudeta militer Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi

Seperti yang sudah dijelaskan mengenai konsep kudeta, maka dapat difahami bahwa kudeta merupakan upaya ilegal dan terbuka oleh militer atau elit lain yang ada dalam aparatur negara dengan tujuan menggulingkan eksekutif yang sedang menjabat. Kasus kudeta yang terjadi di Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi merupakan bagian dari pengambil alihan kekuasaan oleh junta militer yang dipimpin oleh Jendral Min Aung Hlaing selaku Kepala Angkatan Bersenjata. Berdasarkan fakta dan investigasi junta militer Myanmar, ada 6 faktor yang membuat junta militer melakukan pengambil alihan kekuasaan dari Aung San Suu Kyi seperti kecurangan dalam pemilihan umum tahun 2020, melakukan pelanggaran hak asasi manusia berupa genosida terhadap etnis Rohingya, melakukan tindak pidana korupsi dan suap, impor illegal walkie-talkie, menghasut untuk melawan junta militer serta melakukan pelanggaran aturan protocol kesehatan disaat kampanye pemilihan umum Myanmar.

Alasan diatas membuat partai oposisi *Union Solidarity and Development Party* yang didukung oleh junta militer Myanmar untuk melakukan kudeta terhadap Aung San Suu Kyi pada awal tahun 2021. Menurut Edward Luttwak dalam bukunya yang berjudul: *Coup d'tat: a practical handbook* yang ditulis pada tahun 1979 dan dipublish oleh Harvard University menyebutkan bahwa kudeta atau pengambil alih kekuasaan oleh militer ke eksekutif negara dapat berjalan baik dan berhasil jika menerapkan 3 hal yaitu melakukan strategi kudeta, merencanakan kudeta dan melaksanakan kudeta.

1. Strategi Kudeta

Sudah diakui oleh masyarakat internasional bahwa untuk menggulingkan sebuah pemerintah itu tidak mudah. Pemerintah yang sah pasti akan mendapat dukungan penuh dari aparat keamanan, masyarakat

pendukungnya, koalisi partai politik dan dukungan kekuatan politik internasional. Namun bukan berarti sebuah pemerintahan tidak dapat dikudeta atau diambil alih kekuasaannya. Banyak peristiwa di dunia internasional terjadi kudeta terlebih lagi kudeta yang dilakukan oleh militer. Termasuk salah satunya terjadi kudeta militer yang dilakukan oleh Suharto di Indonesia tahun 1967. Selain itu juga ada kudeta militer di Cuba, Libya, Mesir, Thailand dan termasuk juga Myanmar ditahun 2020.

Tentunya kudeta yang dilakukan oleh militer tersebut dapat berhasil ada strategi yang sudah disiapkan untuk mengambil alih kekuasaan. Ada 2 fase strategi kudeta menurut Edward Luttwak dalam pengambil alih kekuasaan yaitu fase transisi dan fase menetralsir. Fase transisi merupakan fase dimana setelah militer melakukan pengambil alih kekuasaan maka segera mungkin melakukan transisi kekuasaan dari eksekutif ke militer. Hal ini juga yang dilakukan oleh junta militer Myanmar. Ketika junta militer dibawah komando jendral Min Aung Hlaing melakukan kudeta, disaat bersamaan junta militer melakukan fase transisi kekuasaan dibawah junta militer. Bahkan junta militer mengeluarkan armada seperti tank dan kekuatan senjata sebagai eksistensi pengambil alih kekuasaan.

Dibawah komando jendral Min Aung Hlaing, fase transisi pengambil alih kekuasaan dapat berjalan baik serta menutup peluang bagi kelompok kelompok yang menentang dan memberi perlawanan bagi junta militer. Hal ini terbukti bahwa tidak ada perlawanan pasca terjadinya kudeta junta militer terlebih lagi Aung San Suu Kyi beserta para jajaran tinggi partai National League for Democracy sudah ditawan oleh junta militer.

Fase selanjutnya adalah menetralsir Myanmar yang dilakukan oleh junta militer. Jendral Min Aung Hlaing melalui media tv militer mengumumkan Myanmar dalam keadaan darurat oleh karena itu kekuasaan pemerintahan diambil alih oleh militer dan menjadikan wakil presiden Myanmar sementara waktu menjadi presiden selama 1 tahun. Upaya yang dilakukan oleh junta militer Myanmar merupakan bagian dari fase menetralsir bagi warga Myanmar. Dengan demikian, junta militer ingin

memastikan bahwa Myanmar dalam kendali militer. Seluruh rakyat Myanmar menjadi tahu bahwa militer mengambil alih kekuasaan sementara di Myanmar melalui media tv militer. Ini merupakan salah satu cara untuk menetralsir pasca terjadi kudeta militer yang dilakukan oleh junta militer Myanmar.

2. Perencanaan kudeta

Sebelum melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah, maka militer harus merencanakan dengan baik perencanaan kudeta. Edward Luttwak menyebutkan bahwa kudeta yang baik harus memiliki perencanaan yang terstruktur. Antara lain, menetralsir kekuatan politik, menahan tokoh tokoh politik berpengaruh, target fisik kudeta, pengendalian telekomunikasi dan media massa, menjaga akses jalan keluar masuk kota serta memperhatikan tokoh religious.

Kudeta yang dilakukan junta militer dibawah komando jendral Min Aung Hlaing bisa disebut terencana dan terstruktur. Pada saat kudeta dilakukan pada awal february 2020, junta militer sudah menetralsir kekuatan politik, dimana wakil presiden Myanmar Myn Swe diproyeksikan menjadi presiden Myanmar sementara berlaku selama 1 tahun. Sedangkan jendral Min Aung Hlaing akan menjadi perdana menteri Myanmar. Diketahui bahwa Myn Swe merupakan berlatar belakang militer dan memiliki hubungan dengan Jendral Min Aung Hlaing.

Junta militer Myanmar juga melakukan penahanan para tokoh politik yang mendukung Aung San Suu Kyi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir perlawanan dan hasutan terhadap junta militer Myanmar. Selain itu telekomunikasi dan media massa dikendalikan oleh junta militer serta melakukan patroli diberbagai jalan dan perbatasan serta memberlakukan jam malam. Dengan perencanaan kudeta yang sudah disiapkan, maka potensi pengambil alih kekuasaan akan berhasil. Junta militer Myanmar melakukannya dengan perencanaan yang sudah direncanakan.

3. Pelaksanaan kudeta

Edward Luttwak menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kudeta perlu mempertimbangkan tiga hal antara lain waktu, urutan dan keamanan. 3 hal ini sangat penting bagi militer yang akan melakukan kudeta. Waktu adalah momen penting dalam melaksanakan kudeta. Idealnya penetapan waktu ketika kudeta adalah sefleksible mungkin. Tidak harus pagi, siang, sore atau malam. Kudeta bisa dilakukan dengan timing (waktu) yang tepat. Sehingga pelaksanaan kudeta sangat fleksible waktunya. Junta militer Myanmar melakukan kudeta pada pagi hari. Menurut junta, waktu pagi saat itu kondisi yang sangat ideal dalam melakukan kudeta. Berdasarkan fakta dilapangan serta pengakuan warga, bahwa junta sudah mengambil alih kekuasaan dari Aung San Suu Kyi sejak pukul 6 pagi waktu Myanmar. Artinya semua tokoh politik yang berkoalisi dengan Aung San Suu Kyi sudah ditahan. Kemudian kendaraan militer ditempatkan di beberapa sudut kota Myanmar untuk meminimalisir perlawanan dan menetralsir keamanan dan keadaan di Myanmar. Dengan pelaksanaan kudeta yang mempertimbangkan waktu yang fleksible, urutan dan keamanan yang sudah terorganisir, kudeta telah berhasil. Hal ini yang dilakukan oleh junta militer Myanmar.

Kesimpulan

Dari uraian dan bahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kudeta militer Myanmar bukan sesuatu yang baru terjadi dimasyarakat internasional. Sebelum kudeta miter Myanmar, kudeta sudah pernah terjadi di beberapa negara dunia termasuk Indonesia. Menurut Edward Luttwak, sebuah kudeta akan berhasil jika mempertimbangkan 3 hal antara lain: Strategi kudeta, perencanaan kudeta dan pelaksanaan kudeta. Junta militer Myanmar melakukan 3 langkah tersebut, sehingga bisa dikatakan kudeta militer yang dilakukan oleh jendral Min Aung Hlaing berhasil. 3 langkah ini merupakan cara junta militer Myanmar dalam melakukan kudeta terhadap Aung San Suu Kyi pada tahun 2021.

Daftar Pustaka

- Aida, N. R (2021, Februari 12). *Kudeta Myanmar, Sebab dan Apa yang Sebenarnya Terjadi?* Dikutip dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/12/123000265/kudeta-myanmar-sebab-dan-apa-yang-sebenarnya-terjadi-?page=all>.
- F.M. Iqbal, & Dwiprigitaningtias, I. (2021). Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Dialektika Hukum Online* Vol.3 No.1.
- Roza, R. (2021). Kudeta Militer di Myanmar: Ujian Bagi ASEAN. *Journal of Info Singkat. XII(4)*, 7-12.
- Sendari, A. A. (2021, November 01). *Kudeta adalah Perebutan Kekuasaan, Kenali Jenis, Faktor, dan Contohnya.* Dikutip dari <https://hot.liputan6.com/read/4699159/kudeta-adalah-perebutan-kekuasaan-kenali-jenis-faktor-dan-contohnya>.
- Sisca, S. P. (2021, November 05). *Apa Maksud dari Kudeta Myanmar.* Dikutip dari <https://internasional.kompas.com/read/2021/11/05/122727370/apa-maksud-dari-kudeta-militer?page=all>
- Garmabar, Padlika (2021) VOL. 3 NO. 2 (2021): REVIEW OF INTERNATIONAL RELATIONS (JURNAL KAJIAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL)